

Dr. Dahlan A. Rahman, M.Si



# PENGANTAR ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK

Teori, Konsep dan Aplikasinya di Aceh



# **PENGANTAR ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK**

---

**Teori, Konsep dan Aplikasinya di Aceh**

**Penulis:**

Dr. Dahlan A. Rahman, M.Si.

**Editor:**

Ade Ikhsan Kamil



## **PENERBIT KBM INDONESIA**

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

# **PENGANTAR ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK**

## **Teori, Konsep dan Aplikasinya di Aceh**

---

*Copyright @2025 By Dr. Dahlan A. Rahman, M.Si.  
All right reserved*

### **Penulis**

Dr. Dahlan A. Rahman, M.Si.

### **Desain Sampul**

Aswan Kreatif

### **Tata Letak**

Sofitahm

### **Editor**

Ade Ikhsan Kamil

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

### **Official**

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

**Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia**

**Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021**

081357517526 (Tlpn/WA)

### **Website**

<https://penerbitkbm.com>

[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

### **Email**

naskah@penerbitkbm.com

### **Distributor**

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

### **Youtube**

Penerbit KBM Sastrabook

### **Instagram**

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

**ISBN: 978-634-202-679-3**

Cetakan ke-1, Agustus 2025

15,5 x 23 cm, vi + 273 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan isi  
buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113**  
**Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



# KATA PENGANTAR

**P**uji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku "Pengantar Analisa Kebijakan Publik: Teori, Konsep dan Aplikasinya di Aceh" ini dapat hadir di hadapan para pembaca sekalian. Buku ini merupakan perwujudan dari gagasan dan upaya untuk menjembatani pemahaman teoritis tentang analisis kebijakan publik dengan realitas praktis yang kaya dan kompleks di Provinsi Aceh.

Analisis kebijakan publik adalah disiplin ilmu yang tak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Di era di mana masalah-masalah sosial semakin rumit mulai dari isu ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan kemampuan untuk memahami, merumuskan, dan mengevaluasi kebijakan secara sistematis menjadi sangat esensial. Buku ini hadir untuk membekali pembaca dengan kerangka berpikir analitis yang diperlukan dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Keistimewaan buku ini terletak pada pendekatannya yang tidak hanya menyajikan teori dan konsep dasar analisis kebijakan publik secara komprehensif, tetapi juga secara khusus mengaitkannya dengan konteks unik Aceh. Provinsi Aceh, dengan sejarah panjang konflik, pengalaman dahsyat pasca-tsunami, dan status otonomi khusus yang dimilikinya, menawarkan laboratorium kebijakan yang tak tertandingi. Berbagai kebijakan, mulai dari implementasi syariat Islam, pengelolaan sumber daya alam, rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-bencana, hingga dinamika Dana Otonomi Khusus, menjadi studi kasus konkret yang diperkaya dengan perspektif lokal.

Buku ini akan mengajak pembaca untuk menyelami berbagai aspek penting dalam analisis kebijakan, termasuk: Mengenal berbagai teori kebijakan publik yang mendasari

pemahaman tentang perilaku aktor dan proses kebijakan. Memahami tahapan siklus kebijakan, mulai dari identifikasi masalah, perumusan agenda, pengembangan dan evaluasi alternatif, hingga implementasi dan dampak. Mempelajari berbagai metode analisis kebijakan seperti analisis biaya-manfaat dan analisis multikriteria.

Menggali peran etika, data, kreativitas, partisipasi masyarakat, serta pengaruh politik dan kelompok kepentingan dalam membentuk kebijakan. Yang terpenting, menerapkan semua konsep ini dalam studi kasus spesifik di Aceh, sehingga memberikan gambaran nyata tentang tantangan dan peluang dalam praktik analisis kebijakan di daerah otonomi khusus.

Sebagai penulis, saya berharap buku ini dapat menjadi referensi berharga bagi mahasiswa, akademisi, praktisi kebijakan, birokrat di lingkungan pemerintahan Aceh maupun nasional, serta masyarakat umum yang memiliki minat terhadap kebijakan publik dan pembangunan di Aceh. Semoga buku ini dapat berkontribusi dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih berkualitas, responsif, akuntabel, dan pada akhirnya, membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat Aceh.

Tiada gading yang tak retak, buku ini pun tak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan inspirasi dalam penyusunan buku ini. Semoga amal kebaikan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah SWT.

Lhokseumawe, 8 Agustus 2025

Dr. Dahlan A. Rahman, M.Si.

# **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB 1 MEMAHAMI ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK .....</b>	<b>1</b>
1.1 Definisi dan Ruang Lingkup Analisa Kebijakan Publik .....	1
1.2 Mengapa Analisa Kebijakan Publik Penting .....	5
1.3 Peran dan Fungsi Analis Kebijakan.....	8
1.4 Sejarah Perkembangan Analisa Kebijakan Publik .....	15
<b>BAB 2 TEORI DASAR DALAM ANALISA KEBIJAKAN .....</b>	<b>23</b>
2.1 Pendekatan Rasional Komprehensif .....	24
2.2 Pendekatan Inkremental .....	26
2.3 Pendekatan Heuristik/ <i>Bounded Rationality</i> .....	31
2.4 Teori Kelompok ( <i>Group Theory</i> ).....	36
2.5 Teori Elit ( <i>Elite Theory</i> ) .....	39
2.5 Teori Pilihan Publik ( <i>Public Choice Theory</i> ).....	42
2.6 Teori Jaringan Kebijakan ( <i>Policy Network Theory</i> ) .....	45
<b>BAB 3 KONSEP KUNCI DALAM KEBIJAKAN PUBLIK .....</b>	<b>53</b>
3.1 Masalah Kebijakan ( <i>Policy Problems</i> ) .....	53
3.2 Agenda Kebijakan ( <i>Policy Agenda</i> ) .....	56
3.3 Perumusan Kebijakan ( <i>Policy Formulation</i> ) .....	58
3.4 Legitimasi Kebijakan ( <i>Policy Legitimation</i> ) .....	61
3.5 Implementasi Kebijakan ( <i>Policy Implementation</i> ).....	64
3.6 Evaluasi Kebijakan ( <i>Policy Evaluation</i> ).....	67
3.7 Dampak Kebijakan ( <i>Policy Impact</i> ) .....	70
<b>BAB 4 IDENTIFIKASI DAN DEFINISI MASALAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>75</b>
4.1 Metode Identifikasi Masalah .....	75
4.2 Pembingkaian Masalah ( <i>Problem Framing</i> ) .....	78

4.3 Pengumpulan Data dan Informasi untuk Definisi Masalah.....	81
<b>BAB 5 PENGEMBANGAN ALTERNATIF KEBIJAKAN.....</b>	<b>85</b>
5.1 Teknik Generasi Alternatif.....	85
5.2 Kreativitas dalam Perumusan Solusi .....	88
5.3 Studi Kasus Mengembangkan Alternatif untuk Masalah Spesifik.....	90
<b>BAB 6 EVALUASI ALTERNATIF KEBIJAKAN .....</b>	<b>95</b>
6.1 Kriteria Evaluasi (Efisiensi, Efektivitas, Ekuitas, Kelayakan Politik, dll.) .....	98
6.2 Metode Analisa Biaya-Manfaat ( <i>Cost-Benefit Analysis</i> ).....	101
6.3 Metode Analisa Multikriteria ( <i>Multi-Criteria Analysis</i> ).....	104
6.4 Analisa Risiko dan Ketidakpastian.....	108
<b>BAB 7 REKOMENDASI KEBIJAKAN .....</b>	<b>113</b>
7.1 Struktur dan Isi Rekomendasi.....	116
7.2 Strategi Komunikasi Rekomendasi kepada Pengambil Keputusan .....	119
7.3 Etika dalam Memberikan Rekomendasi.....	123
<b>BAB 8 KONTEKS KEBIJAKAN PUBLIK DI ACEH .....</b>	<b>127</b>
8.1 Sejarah Politik dan Pemerintahan Aceh (sebelum dan sesudah MoU Helsinki).....	130
8.2 Karakteristik Unik Masyarakat dan Budaya Aceh .....	133
8.3 Struktur Kelembagaan Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota .....	136
8.4 Isu-isu Prioritas dalam Kebijakan Publik di Aceh (ekonomi, sosial, lingkungan, syariat Islam, perdamaian, dll.) .....	139
<b>BAB 9 STUDI KASUS ANALISA KEBIJAKAN DI SEKTOR SPESIFIK ACEH .....</b>	<b>145</b>
9.1 Studi Kasus 1 Kebijakan Syariat Islam .....	148
9.2 Studi Kasus 2: Kebijakan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca-Tsunami .....	162

9.3	Studi Kasus 3 Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Migas/Hutan) .....	178
9.4	Studi Kasus 4 Kebijakan Otonomi Khusus dan Dana Otsus .....	189
<b>BAB 10 TANTANGAN DAN PELUANG DALAM ANALISA KEBIJAKAN DI ACEH.....</b>	<b>203</b>	
10.1	Tantangan dalam Analisis Kebijakan di Aceh.....	203
10.2	Peluang dalam Analisis Kebijakan di Aceh.....	205
10.3	Kendala Data dan Informasi.....	207
10.4	Pengaruh Politik dan Kepentingan Kelompok .....	211
10.5	Kapasitas Analis Kebijakan di Aceh .....	215
10.6	Peran Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan .....	219
10.7	Peluang untuk Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik di Aceh .....	223
<b>BAB 11 MASA DEPAN ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK DI ACEH .....</b>	<b>231</b>	
11.1	Penguatan Analisis Berbasis Bukti ( <i>Evidence-Based Policymaking</i> ) .....	231
11.2	Peningkatan Kapasitas Analis Kebijakan yang Sensitif Konteks: .....	232
11.3	Manfaatkan Kekhususan Otonomi dan Budaya sebagai Kekuatan .....	232
11.4.	Penguatan Partisipasi Masyarakat yang Bermakna ....	233
11.5	Kolaborasi Lintas Sektor dan Lintas Aktor .....	233
11.6	Tantangan yang Tetap Relevan .....	234
11.7	Integrasi Analisa Kebijakan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik .....	234
11.8	Pentingnya Riset Kebijakan Berkelanjutan.....	238
11.9	Rekomendasi untuk Pengembangan Kapasitas dan Implementasi Analisa Kebijakan Publik di Aceh .....	241
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>245</b>	
<b>PROFIL PENULIS.....</b>	<b>271</b>	

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abelson, Donald E. (2018). *Do think tanks matter?: Assessing the impact of public policy institutes*. McGill-Queen's Press-MQUP.
- Abubakar, Abubakar, Eka Srimulyani, and Anwar Anwar. "Identification of some distinctive values of Acehnese Malee (Shyness) for character education." *Jurnal Ilmiah Peuradeun*7.1 (2019): 125-140.
- Adler, Alejandro, & Seligman, Martin E. P. (2016). Using wellbeing for public policy: Theory, measurement, and recommendations. *International Journal of Wellbeing*, 6(1).
- Adler, Matthew D., & Posner, Eric A. (1999). Rethinking cost-benefit analysis. *Yale Law Journal*, 109, 165.
- Adnan, Fachri, & Khairdir, Afriva. (2025). Teori Dan Implementasi Pengambilan Keputusan Dan Kaitannya Dengan Teori Rational Choice Dalam Administrasi Publik. *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE*, 6(2), 97-107.
- Affan, Muzailin, et al. (2015). *Lessons learned from two villages in the tsunami most affected area of Banda Aceh City; a review of the housing reconstruction and the current state of village development*. Dalam Y. Omori & I. Marfai (Eds.), Post-tsunami hazard: Reconstruction and restoration (hlm. 59-72). Springer.
- Agyepong, Irene Akua, & Adjei, Sam. (2008). Public social policy development and implementation: a case study of the Ghana National Health Insurance scheme. *Health Policy and Planning*, 23(2), 150-160.
- Ahmady, Iqbal, Ubaidullah Ubaidullah, & Hasan, Effendi. (2019). *The Cycle and Risk of Conflict in Aceh Post MoU Helsinki*. 1st Aceh Global Conference (AGC 2018). Atlantis Press.
- Ahuja, Suniti. (2015). Evolution of Human Societies. *International Journal of Innovative Research and Development*, 4(2).

- Al Ayubi, M. Solahudin, & Zahidi, M. Syaprin. (2022). Perbandingan Pengaruh Women's March terhadap Kebijakan Publik di Indonesia dan Amerika Serikat [Comparison of the Effect of the Mowen's March on Public Policy in Indonesia and The United States]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(1), 119-142.
- Ambarwati, Puji, Fathurrohman, Nanang, & Fauzi, Anis. (2024). Perumusan Masalah Kebijakan, Alternatif Kebijakan, dan Rekomendasi Kebijakan dalam Mempengaruhi Perkembangan Kurikulum Pendidikan. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(5), 1598-1605.
- Andang, Baharuddin. (2019). *INTERAKSI ELIT DALAM FORMULASI KEBIJAKAN ANGGARAN*. Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepabdian Kepada Masyarakat (SNP2M), 4.
- Anderson, Elizabeth. (2011). Democracy, Public Policy, and Lay Assessments of Scientific Testimony. *Episteme*, 8(2), 144-164.
- Anderson, James E. (1992). *Public*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Anderson, James E. (2015). *Terrorism, trade and public policy*. *Research in Economics*, 69(2), 180-190.
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan publik*. Pustaka Setia.
- Anisya, Putri Ayu. (2024). Analisis Konseptual Teori Dan Proses Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 3(1), 94-100.
- Ansell, Chris. (2016). Collaborative governance as creative problem-solving. Dalam R. J. J. M. van Gestel & W. J. M. Kickert (Eds.), *Enhancing public innovation by transforming public governance* (hlm. 35-53). Edward Elgar Publishing.
- Anshori, Isa. (2017). PERILAKU MEMILIH LEMBAGA PENDIDIKAN: Prespektif teori Rational Choice dan Bounded Rational. UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Asfiah, Eka Wardatul, et al. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK: IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH. *Consilium: Education and Counseling Journal*, 4(2), 201-208.
- Aspinall, Edward, & Centre for Humanitarian Dialogue. (2008). *Peace without Justice?: The Helsinki Peace Process in Aceh*. HD Centre for Humanitarian Dialogue.
- Aspinall, Edward. "From Islamism to Nationalism in Aceh, Indonesia." *Nations and Nationalism* 13.2 (2007): 245-263.
- Aspinall, Edward. (2005). *The Helsinki Agreement: A more promising basis for peace in Aceh?*. East-West Center.
- Baas, Larry R., & Thomas, Dan. (1984). *The Supreme Court and policy legitimization: Experimental tests*. *American Politics Quarterly*, 12(3), 335-360.
- Bachman, Philip, & Precup, Doina. (2015). *Data generation as sequential decision making*. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 28.
- Barrett, Susan, & Fudge, Colin (Eds.). (2025). *Policy and action: essays on the implementation of public policy*. Taylor & Francis.
- Barter, Shane Joshua, & Wangge, Hipolitus Ringgi. (2022). Indonesian Autonomies: Explaining Divergent Self-Government Outcomes in Aceh and Papua. *Publius: The Journal of Federalism*, 52(1), 55-81.
- Basri, Hasan. "Islam in Aceh: institutions, scholarly traditions, and relations between ulama and umara." *Aceh: History, politics and culture* (2010): 180-200.
- Basri, Hasan. (2010). *Islam in Aceh: institutions, scholarly traditions, and relations between ulama and umara*. Dalam A. Reid (Ed.), *Aceh: History, politics and culture* (hlm. 180-200). ISEAS Publishing.
- Baumgartner, Frank R., & Jones, Bryan D. (2015). *The politics of information: Problem definition and the course of public policy in America*. University of Chicago Press.

- Bendor, Jonathan. (2015). *Incrementalism: Dead yet flourishing*. *Public Administration Review*, 75(2), 194-205.
- Birkland, Thomas A. (2017). Agenda setting in public policy. Dalam F. Fischer & G. J. Miller (Eds.), *Handbook of public policy analysis* (hlm. 89-104). Routledge.
- Boadway, Robin. (2006). *Principles of cost-benefit analysis*. *Public Policy Review*, 2(1), 1-44.
- Boaz, Annette, Fitzpatrick, Siobhan, & Shaw, Ben. (2009). *Assessing the impact of research on policy: a literature review*. *Science and Public Policy*, 36(4), 255-270.
- Borén, Thomas, & Young, Craig. (2013). Getting creative with the 'creative city'? Towards new perspectives on creativity in urban policy. *International Journal of Urban and Regional Research*, 37(5), 1799-1815.
- Brent, Robert J. (2006). *Applied cost-benefit analysis*. Edward Elgar Publishing.
- Brewer, Paul R., & Gross, Kimberly. (2010). *Studying the effects of framing on public opinion about policy issues*. Dalam P. D'Angelo & J. A. Kuypers (Eds.), *Doing news framing analysis: Empirical and theoretical perspectives* (hlm. 159-186). Routledge.
- Broadnax, Walter D. (1976). *Public Policy: Its Formulation, Adoption, Implementation, and Evaluation*. *Public Administration Review*, 36(6), 699-703.
- Burstein, Paul. (2003). *The impact of public opinion on public policy: A review and an agenda*. *Political Research Quarterly*, 56(1), 29-40.
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. "From power to cultural landscapes: Rewriting history of shi 'ah in aceh." *Journal of Indonesian Islam* 11.2 (2017): 509-530.
- Capucha, Luís, et al. (2014). *The role of stereotyping in public policy legitimization: the case of the pigs label*. *Comparative Sociology*, 13(4), 482-502.
- Chairunnisa, Lathifah, Habibi, Fikri, & Berthanila, Rethorika. (2023). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi

- Publik. Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara), 11(2), 31-45.
- Christiansen, Jesper, & Bunt, Laura. (2012). Innovation in policy: allowing for creativity. Dalam J. Torfing & J. P. Olsen (Eds.), Social Complexity and Uncertainty in Public Governance (hlm. 38). Edward Elgar Publishing.
- Clark, Phillip G. (1993). Moral discourse and public policy in aging: Framing problems, seeking solutions, and “public ethics”. Canadian Journal on Aging/La Revue Canadienne Du Vieillissement, 12(4), 485-508.
- Clarke, Matthew, Fanany, Ismet, & Kenny, Sue (Eds.). (2010). Post-disaster reconstruction: Lessons from Aceh. Earthscan.
- Coburn, Cynthia E. (2006). Framing the problem of reading instruction: Using frame analysis to uncover the microprocesses of policy implementation. American Educational Research Journal, 43(3), 343-379.
- Colander, David, & Kupers, Roland. (2014). Complexity and the art of public policy: Solving society's problems from the bottom up. Princeton University Press.
- Cox Jr, Louis Anthony. (2012). Confronting deep uncertainties in risk analysis. Risk Analysis: An International Journal, 32(10), 1607-1629.
- Cristina, Gabriel. "The Acehnese Folklore and Social Behavior." Journal of Aceh Studies 1.1 (2024): 51-60.
- Daoust, Marc-Kevin, & Babin, Victor. (2023). Two philosophical issues surrounding the structure of public-policy recommendations. Dialogue: Canadian Philosophical Review/Revue Canadienne De Philosophie, 62(3), 431-446.
- Darmawan, I. Gede Wira Adhi. (2022). Asymmetric Decentralization: An Analysis of the Implementation of Aceh Special Autonomy and Its Impact on the Welfare of Acehnese Society. Advanced Journal of Social Science, 10(1), 30-44.

- DeLeon, Peter, & Varda, Danielle M. (2009). Toward a theory of collaborative policy networks: Identifying structural tendencies. *Policy Studies Journal*, 37(1), 59-74.
- Dhami, Sanjit, & Sunstein, Cass R. (2022). *Bounded rationality: heuristics, judgment, and public policy*. MIT Press.
- Dhami, Sanjit, Ali Al-Nowaihi, & Sunstein, Cass R. (2019). Heuristics and public policy: Decision-making under bounded rationality. *Studies in Microeconomics*, 7(1), 7-58.
- Dobes, Leo, & Bennett, Jeff. (2009). Multi-criteria Analysis: "Good Enough" for government work?. *Agenda: A Journal of Policy Analysis and Reform*, 16(3), 7-29.
- Dovers, Stephen R. (1995). A framework for scaling and framing policy problems in sustainability. *Ecological Economics*, 12(2), 93-106.
- Dowding, Keith. (1995). Model or metaphor? A critical review of the policy network approach. *Political Studies*, 43(1), 136-158.
- Duek, Ana, & Rusli, Ridwan. (2010). The natural resources industry in decentralised Indonesia: how has decentralisation impacted the mining, oil and gas industries. CREA Discussion Paper 2010-5. University of Luxembourg.
- Enroth, Henrik. (2011). Policy network theory. Dalam M. Bevir (Ed.), *The SAGE handbook of governance* (hlm. 19-35). SAGE Publications.
- Fardian, M. Iqbal, Hidayati, Emi, & Septalinda, Ficky. (2024). Inovasi Kebijakan Publik di Banyuwangi dan redistribusi kesejahteraan dalam sudut pandang Public Choice dan Institutional Logic Theory. *Konferensi Nasional Mitra FISIP*, 2(1), 148-158.
- Fauzan, Ahmad. (2024). Model Implementasi Kebijakan Publik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 17929-17938.
- Ferretti, Valentina, Pluchinotta, Irene, & Tsoukiàs, Alexis. (2019). Studying the generation of alternatives in public policy

- making processes. European Journal of Operational Research, 273(1), 353-363.
- Ferretti, Valentina, Pluchinotta, Irene, & Tsoukiàs, Alexis. (2019). Studying the generation of alternatives in public policy making processes. European Journal of Operational Research, 273(1), 353-363.
- Ferretti, Valentina, Pluchinotta, Irene, & Tsoukiàs, Alexis. (2019). Studying the generation of alternatives in public policy making processes. European Journal of Operational Research, 273(1), 353-363.
- Ferretti, Valentina, Pluchinotta, Irene, & Tsoukiàs, Alexis. (2019). Studying the generation of alternatives in public policy making processes. European Journal of Operational Research, 273(1), 353-363.
- Ferretti, Valentina, Pluchinotta, Irene, & Tsoukiàs, Alexis. (2019). Studying the generation of alternatives in public policy making processes. European Journal of Operational Research, 273(1), 353-363.
- Fischer, Frank, & Miller, Gerald J. (Eds.). (2017). Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods. Routledge.
- Gamper, Catherine D., & Turcanu, Catrinel. (2007). On the governmental use of multi-criteria analysis. Ecological Economics, 62(2-3), 298-307.
- Giljum, Stefan, et al. (2006). Policy recommendations. Report from MOSUS Work Package 6.
- Goddard, Stacie E., & Krebs, Ronald R. (2015). Rhetoric, legitimization, and grand strategy. Security Studies, 24(1), 5-36.
- Gormley Jr, William T. (2007). Public policy analysis: Ideas and impacts. Annual Rev. Polit. Sci., 10(1), 297-313.
- Green-Pedersen, Christoffer, & Mortensen, Peter B. (2012). Policy agenda-setting studies: Attention, politics and the public. Dalam M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin (Eds.), Routledge handbook of public policy (hlm. 167-174). Routledge.

- Greenberg, George D., Miller, Jeffrey A., Mohr, Lawrence B., & Vladeck, Bruce C. (1977). Developing public policy theory: Perspectives from empirical research. *American Political Science Review*, 71(4), 1532-1543.
- Gregory, Robert. (1989). Political Rationality or 'Incrementalism'? Charles E. Lindblom's enduring contribution to public policy making theory. *Policy & Politics*, 17(2), 139-153.
- Grindle, Merilee. (2021). Bureaucrats, politicians, and peasants in Mexico: A case study in public policy. University of California Press.
- Guess, George M. (2011). Cases in public policy analysis. Georgetown University Press.
- Hadipoetro, Sajidi, & Nurandi, Andi. (1996). The Development of Petroleum and Natural Gas as the Center of Growth in Aceh; A Case Analysis. SPE International Conference and Exhibition on Health, Safety, Environment, and Sustainability?. SPE.
- Hakim, Dzaki Naufal, Ramadan, Fitrah, & Cahyono, Yunida Indira. (2021). Studi Pemanfaatan Big Data dalam Perumusan Kebijakan Publik pada Sektor Kesehatan. *SPECTA Journal of Technology*, 5(3), 308-322.
- Hamidah, D. (2020). Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 9(1), 34-44.
- Hanberger, Anders. (2001). What is the policy problem? Methodological challenges in policy evaluation. *Evaluation*, 7(1), 45-62.
- Hanisy, Asmad. (2013). Konsep dasar analisis kebijakan. Al Qodiri: *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 4(1), 48-63.
- Harcourt, Bernard E. (2018). The systems fallacy: a genealogy and critique of public policy and cost-benefit analysis. *The Journal of Legal Studies*, 47(2), 419-447.
- Hayes, Michael T. (1992). Incrementalism and public policy (Vol. 25). Longman.

- Head, Brian W. (2022). *Wicked problems in public policy: Understanding and responding to complex challenges*. Springer International Publishing.
- Head, Brian W. (2022). Debates in public policy—Problem framing, knowledge and interests. Dalam B. W. Head (Ed.), *Wicked problems in public policy: Understanding and responding to complex challenges* (hlm. 7-19). Springer International Publishing.
- Head, Brian W., & Alford, John. (2015). Wicked problems: Implications for public policy and management. *Administration & Society*, 47(6), 711-739.
- Hedman, Eva-Lotta E. (2009). Deconstructing reconstruction in post-tsunami Aceh: governmentality, displacement and politics. *Oxford Development Studies*, 37(1), 63-76.
- Hellström, Tomas, & Jacob, Merle. (2011). *Policy uncertainty and risk: Conceptual developments and approaches*. Springer Science & Business Media.
- Hikmawan, M. Dian. (2017). Politik Perbedaan: Minoritas dalam Implementasi Kebijakan. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 1(1).
- Hill, Michael, & Hupe, Peter. (2021). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance*. SAGE Publications.
- Höchtl, Johann, Parycek, Peter, & Schöllhammer, Ralph. (2016). Big data in the policy cycle: Policy decision making in the digital era. *Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce*, 26(1-2), 147-169.
- Hodges, James S. (1987). Uncertainty, policy analysis and statistics. *Statistical Science*, 2(3), 259-275.
- Hoppe, Robert. (2010). Cultures of public policy problems. Dalam R. Hoppe (Ed.), *The governance of problems* (hlm. 91-120). Policy Press.

- Howlett, Michael, & Mukherjee, Ishani. (Eds.). (2017). *Handbook of policy formulation*. Edward Elgar Publishing.
- Ilhami, Dwi. (2011). Analisis kebijakan publik pada undang-undang pornografi komisi VIII DPR RI dalam perspektif model rasional komprehensif. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- IM, Syuga Firda, Syahputra Damanik, Putri Salsabila Siregar, Indah Permata Sari Siregar, Nur Asriana. (2025). Formulasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Penelitian. Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 1(6), 50-55.
- James, Thomas E., & Jorgensen, Paul D. (2009). Policy knowledge, policy formulation, and change: Revisiting a foundational question. *Policy Studies Journal*, 37(1), 141-162.
- Jati, Wasisto Raharjo. (2023). Managing Ethno-Nationalism within Special Territorial Autonomy Policy: Comparative Cases between Aceh and Papua. *Jurnal Politik*, 9(1), 3.
- Jenkins-Smith, Hank C., & Sabatier, Paul A. (1993). The study of public policy processes. *The Nation's Health*, 135-142.
- Jetzek, Thorhildur, Avital, Michel, & Bjørn-Andersen, Niels. (2013). Generating Value from Open Government Data. *ICIS 2013 Proceedings*.
- John, Peter. (2013). The policy agendas project: a review. Dalam B. D. Jones & F. R. Baumgartner (Eds.), *Comparative studies of policy agendas* (hlm. 17-28). Routledge.
- Johnson, Albert W. (1978). Public policy: creativity and bureaucracy. *Canadian Public Administration*, 21(1), 1-15.
- Jones, Bryan D., & Baumgartner, Frank R. (2005). A model of choice for public policy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 15(3), 325-351.
- Jordan, A., & Turnpenny, John R. (2015). The tools of policy formulation. Dalam J. R. Turnpenny & A. Jordan (Eds.), *Actors, Capacities, Venues and Effects*. Edward Elgar Publishing.

- Just, Richard E., Hueth, Darrell L., & Schmitz, Andrew. (2005). The welfare economics of public policy: a practical approach to project and policy evaluation. Edward Elgar Publishing.
- Kadir, MY Aiyub. (2012). A Study on Peace Agreement Helsinki Memorandum of Understanding 2005. Aceh Int. J. Soc. Sci, 1(2), 63-76.
- Keeney, Ralph L. (2004). Framing public policy decisions. International Journal of Technology, Policy and Management, 4(2), 95-115.
- Kenny, Sue, et al. (2010). Deconstructing Aceh's reconstruction. Dalam M. Clarke, I. Fanany, & S. Kenny (Eds.), Post-Disaster Reconstruction (hlm. 3-25). Routledge.
- Kenny, Sue, et al. (2010). Deconstructing Aceh's reconstruction. Dalam M. Clarke, I. Fanany, & S. Kenny (Eds.), Post-Disaster Reconstruction (hlm. 3-25). Routledge.
- Khairi, Halilul. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. Atmospheric Environment, 42(13), 2934-2947.
- Khudayberganov, Arslonbek Kalandarovich. (2025). SPIRITUALITY-THE FOUNDATION OF SOCIETY'S DEVELOPMENT. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 5(4), 357-361.
- Kickert, Walter JM, Klijn, Erik-Hans, & Koppenjan, Joop FM. (1997). Policy networks: an overview. Dalam W. J. M. Kickert, E.-H. Klijn, & J. F. M. Koppenjan (Eds.), Managing complex networks: Strategies for the public sector (hlm. 15-34). SAGE Publications.
- Kingdon, John W., & Stano, Eric. (1984). Agendas, alternatives, and public policies (Vol. 45). Little, Brown.
- Kingsbury, Damien. (2010). Political reconstruction in Aceh. Dalam M. Clarke, I. Fanany, & S. Kenny (Eds.), Post-Disaster Reconstruction (hlm. 61-78). Routledge.
- Klijn, Erik-Hans, & Koppenjan, Joop FM. (2000). Public management and policy networks: foundations of a network

- approach to governance. *Public Management an International Journal of Research and Theory*, 2(2), 135-158.
- Klosterman, Richard E. (1980). A public interest criterion. *Journal of the American Planning Association*, 46(3), 323-333.
- Lamb, Michael E., Russell, Graeme, & Sagi, Abraham. (2014). Summary and recommendations for public policy. Dalam M. E. Lamb, G. Russell, & A. Sagi (Eds.), *Fatherhood and family policy* (hlm. 247-258). Routledge.
- Lau, Richard R., & Schlesinger, Mark. (2005). Policy frames, metaphorical reasoning, and support for public policies. *Political Psychology*, 26(1), 77-114.
- Lawrence, Regina G. (2000). Game-framing the issues: Tracking the strategy frame in public policy news. *Political Communication*, 17(2), 93-114.
- Lele, Gabriel. (2023). Asymmetric decentralization, accommodation and separatist conflict: lessons from Aceh and Papua, Indonesia. *Territory, Politics, Governance*, 11(5), 972-990.
- Lindquist, Evert A., & Wellstead, Adam. (2021). The policy cycle: From heuristic to a theory-informed research and advice. Dalam R. Gregory & D. E. Miller (Eds.), *Handbook of public administration* (hlm. 303-322). Routledge.
- Liu, Helen K. (2017). An analysis of online interaction in idea generation for public policies. *Information Polity*, 22(2-3), 117-135.
- Lowi, Theodore J. (1964). American business, public policy, case-studies, and political theory. *World Politics*, 16(4), 677-715.
- Lucas Jr, Robert E. (1976). Econometric policy evaluation: A critique. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1, 19-46. North-Holland.
- Macintyre, Sally, et al. (2001). Using evidence to inform health policy: case study. *BMJ*, 322(7280), 222-225.

- Majone, Giandomenico. (2006). Agenda setting. Dalam M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin (Eds.), *The Oxford handbook of public policy* (hlm. 228-250). Oxford University Press.
- Manazir, Sharique Hassan. (2023). Reimagining public policy formulation and analysis: a comprehensive theoretical framework for public policy. *Discover Global Society*, 1(1), 16.
- Manski, Charles F. (2012). *Public policy in an uncertain world: analysis and decisions*. Harvard University Press.
- Manuel, Savanna Fransisca Sylvia. (2024). Penerapan Konsep What's The Problem Represented To Be Approach Dalam Pembentukan Badan Usaha Milik Desa: Studi Kasus Pasar Desa Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(4), 271-281.
- Matsumaru, Ryo, Nagami, Kozo, & Takeya, Kimio. (2012). Reconstruction of the Aceh Region following the 2004 Indian Ocean tsunami disaster: A transportation perspective. *IATSS Research*, 36(1), 11-19.
- Mavrot, Céline, et al. (2024). What evaluation criteria are used in policy evaluation research: A cross-field literature review. *Evaluation and Program Planning*, 100, 102322.
- Mawardi, Ahmad Imam. (2019). Charles Wright mills dan teori power elite: Membaca Konteks dan pemetaan teori sosiologi politik tentang kelas elite kekuasaan. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 4(2).
- Maxim, Laura, & van der Sluijs, Jeroen P. (2011). Quality in environmental science for policy: Assessing uncertainty as a component of policy analysis. *Environmental Science & Policy*, 14(4), 482-492.
- McCarthy, John F. (2007). The demonstration effect: Natural resources, ethnonationalism and the Aceh conflict. *Singapore Journal of Tropical Geography*, 28(3), 314-333.
- McGibbon, Rodd. (2004). Secessionist challenges in Aceh and Papua: Is special autonomy the solution?. East-West Center.

- Meutia, Intan Fitri. (2017). Analisis kebijakan publik. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Mishan, Edward J., & Quah, Euston. (2020). Cost-benefit analysis. Routledge.
- Missbach, Antje. "“That is Jakarta’s Project”: Views from the Acehnese Diaspora on Shari‘a, Self-determination and Political Conspiracy." *Islam and the Limits of the State* (2016): 214.
- Missbach, Antje. (2011). The Acehnese diaspora after the Helsinki Memorandum of Understanding: Return challenges and diasporic post-conflict transformations. *Asian Ethnicity*, 12(2), 179-201.
- Missbach, Antje. (2016). "That is Jakarta’s Project": Views from the Acehnese Diaspora on Shari‘a, Self-determination and Political Conspiracy. Dalam M. B. Amir-Moazami (Ed.), *Islam and the Limits of the State* (hlm. 214). Routledge.
- Mladineo, Nenad, et al. (1992). An evaluation of multicriteria analysis for DSS in public policy decision. *European Journal of Operational Research*, 61(1-2), 219-229.
- Mondak, Jeffery J. (1994). Policy legitimacy and the Supreme Court: The sources and contexts of legitimization. *Political Research Quarterly*, 47(3), 675-692.
- Morris, Eric. "Aceh: Social revolution and the Islamic vision." *Regional dynamics of the Indonesian revolution: Unity from diversity* (1985): 83-110.
- Moseley, Alice, & Thomann, Eva. (2021). A behavioural model of heuristics and biases in frontline policy implementation. *Policy & Politics*, 49(1), 49-67.
- Mossberger, Karen, & Wolman, Harold. (2003). Policy transfer as a form of prospective policy evaluation: Challenges and recommendations. *Public Administration Review*, 63(4), 428-440.

- Mourato, Susana. (2006). Cost-benefit analysis and the environment. OECD.
- Mukti, Takdir Ali, et al. (2020). The future of peace between Aceh and Jakarta under Helsinki Agreement 2005. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(3), 657-664.
- Mulia, Rizki Afri. (2019). Influence Of Public Policy, Participation Of Community And Education Level To Public Welfare In Padang Pariaman District. *Jurnal El-Riyasah*, 10(1), 37-56.
- Munda, Giuseppe. (2019). Multi-criteria evaluation in public economics and policy. Dalam S. Greco, M. Ehrgott, & J. R. Figueira (Eds.), *New Perspectives in Multiple Criteria Decision Making: Innovative Applications and Case Studies* (hlm. 297-313). Springer International Publishing.
- Musgrave, Richard A. (1969). Cost-benefit analysis and the theory of public finance. *Journal of Economic Literature*, 7(3), 797-806.
- Na Thalang, Chanintira. "The fluidity of nationalistic and ethnic aspirations in Aceh." *Nations and Nationalism* 15.2 (2009): 319-339.
- Nagel, Stuart S. (Ed.). (2002). *Policy Creativity: New Perspectives*. Nova Publishers.
- Nas, Tevfik F. (2016). *Cost-benefit analysis: Theory and application*. Lexington Books.
- Nazara, Suahasil, & Resosudarmo, Budy P. (2007). Aceh-Nias reconstruction and rehabilitation: Progress and challenges at the end of 2006. The Australian National University.
- Nekola, Martin, & Kohoutek, Jan. (2017). Policy formulation as policy work: developing options for government. Dalam M. Howlett & I. Mukherjee (Eds.), *Handbook of policy formulation* (hlm. 39-62). Edward Elgar Publishing.
- Nelson, Barbara J. (1996). *Public policy and Administration: an Overview*. Dalam R. E. Goodin & H.-D. Klingemann (Eds.), A

- new handbook of political science (hlm. 559-594). Oxford University Press.
- Nugroho, Riant. (2021). Kebijakan Publik: Praktik Analisis Kebijakan. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. (2023). Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik. PT Elex Media Komputindo.
- Nur, Andi Cudai, & Guntur, Muhammad. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Publisher UNM.
- Nurkhamid, Muh. (2023). Perspektif public choice theory pada pakaian bekas impor di Indonesia dan dampaknya terhadap keuangan negara. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(6), 3173-3186.
- Nwafor-Orizu, Ideobodo, Chinyere, Okolo Modesta, & Tochukwu, Eze Kieran. (2018). Public policy formulation and implementation in Nigeria: questions, challenges and prospects. Global Journal of Management and Business Research: An Administration and Management, 18(13), 44-52.
- O'Faircheallaigh, Ciaran. (2010). Public participation and environmental impact assessment: Purposes, implications, and lessons for public policy making. Environmental Impact Assessment Review, 30(1), 19-27.
- Oxman, Andrew D., et al. (2010). A framework for mandatory impact evaluation to ensure well informed public policy decisions. The Lancet, 375(9712), 427-431.
- Özgür, Hüseyin. (Tidak ada tahun publikasi). An Overview of the Stages (Heuristics) Model as a Public Policy Analysis Framework.
- Palfrey, Colin, Thomas, Paul, & Phillips, Ceri. (2012). Selecting evaluation criteria. Dalam C. Palfrey, P. Thomas, & C. Phillips (Eds.), Evaluation for the Real World (hlm. 93-124). Policy Press.

- Paté-Cornell, Elisabeth. (2002). Risk and uncertainty analysis in government safety decisions. *Risk Analysis*, 22(3), 633-646.
- Payne, Troy C., et al. (2013). Problem framing in problem solving: A case study. *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 36(4), 670-682.
- Peters, B. Guy. (2018). Policy problems and policy design. Edward Elgar Publishing.
- Peters, B. Guy. (2020). The problem of policy problems. Dalam B. G. Peters (Ed.), *Theory and Methods in Comparative Policy Analysis Studies* (hlm. 59-80). Routledge.
- Prabujaya, SenaPutra. (2012). Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Perspektif Public Choice Theory (Studi Kasus pada Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo Kota Batu). Universitas Brawijaya.
- Pradana, Roni, & Irwansyah, Wahyuni Retno Wulandari. (2024). Upstream Oil and Gas Management: Legal Policy of Aceh's Special Autonomy Perspective. *Sch Int J Law Crime Justice*, 7(8), 329-333.
- Pribadi, Krishna S., et al. (2014). Post-disaster housing reconstruction in Indonesia: Review and lessons from Aceh, Yogyakarta, West Java and West Sumatera earthquakes. Dalam N. D. The. *Disaster Recovery: Used or Misused Development Opportunity* (hlm. 197-223). Routledge.
- RADU, Claudia Florina. (2013). The Importance of the State's Involvement in Economy. *Scientific Journal of Humanistic Studies*, 5(8).
- Rahmawati, Rahmawati. (2025). Kebijakan Publik (Analisis Teori dan Politik). YPAD Penerbit.
- Rantung, Margareth Inof Riisyie. (2024). *Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Model)*. Penerbit Tahta Media.
- Rayman, Paula M., & Bookman, Ann. (1999). Creating a research and public policy agenda for work, family, and community.

- The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 562(1), 191-211.
- Reid, Anthony. "War, peace and the burden of history in Aceh." *Asian Ethnicity* 5.3 (2004): 301-314.
- Rein, Martin, et al. (1991). Framing in policy discourse. Dalam M. Rein & P. Marris (Eds.), *Social sciences and modern states: National experiences and theoretical crossroads* (hlm. 262). Harvard University Press.
- Riesgo, Laura, & Gómez-Limón, José A. (2006). Multi-criteria policy scenario analysis for public regulation of irrigated agriculture. *Agricultural Systems*, 91(1-2), 1-28.
- Roskies, D. M. "Aceh: Art and Culture." (1999): 722-724.
- Roskies, D. M. (1999). Aceh: Art and Culture. *The Garland Encyclopedia of World Music*, 4, 722-724.
- Rossell, Christine H. (1993). Using multiple criteria to evaluate public policies: The case of school desegregation. *American Politics Quarterly*, 21(2), 155-184.
- Rothstein, Mark A. (2004). Policy recommendations. Dalam M. A. Rothstein (Ed.), *Genetics and Life Insurance: Medical Underwriting and Social Policy* (hlm. 669-748). Oxford University Press.
- Rychetnik, Lucie, et al. (2002). Criteria for evaluating evidence on public health interventions. *Journal of Epidemiology & Community Health*, 56(2), 119-127.
- Rycroft, Robert W. (1978). Selecting policy evaluation criteria: Toward a rediscovery of public administration. *Midwest Review of Public Administration*, 12(2), 87-98.
- Sabatier, Paul A. (2016). THE STAGES HEURISTIC AND ITS LIMITS. Dalam M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin (Eds.), *Comparing Government Activity* (hlm. 101). Edward Elgar Publishing.

- Saetren, Harald. (2014). Implementing the third generation research paradigm in policy implementation research: An empirical assessment. *Public Policy and Administration*, 29(2), 84-105.
- Safaruddin, Safaruddin, et al. (2025). The Implementation of the Aceh Special Autonomy Policy towards Poverty Alleviation in Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 9(1), 597-616.
- Samad, Sri Astuti A. "Character education base on local wisdom in Aceh (Study on tradition of children education in Aceh community)." *Al-Ulum* 15.2 (2015): 351-370.
- Sari, Leni Pitri, Khairiyah, Miftahul, & Amin, Muhammad. (2024). TEORI KEBIJAKAN PENDIDIKAN. *Jurnal Perubahan Ekonomi*, 8(6).
- Schmidt, Vivien A. (2001). Discourse and the legitimization of economic and social policy change in Europe. Dalam G. D. Herrigel, V. A. Schmidt, & V. A. Schmidt (Eds.), *Globalization and the European Political Economy* (hlm. 229-72). Blackwell Publishing.
- Schneider, Anne, & Ingram, Helen. (1988). Systematically pinching ideas: A comparative approach to policy design. *Journal of Public Policy*, 8(1), 61-80.
- Schröter, Susanne. "Acehnese culture (s): Plurality and homogeneity." Aceh: History, Politics and Culture, Singapore: ISEAS (2010): 157-179.
- Schröter, Susanne. (2010). Acehnese culture (s): Plurality and homogeneity. Dalam A. Reid (Ed.), Aceh: History, Politics and Culture (hlm. 157-179). ISEAS.
- Schulze, Kirsten E. (2007). *The conflict in Aceh: struggle over oil*. Dalam D. Luong & G. H. R. D. D. (Eds.), Oil wars (hlm. 183-224). Routledge.
- Septiana, Anis Ribcalia, et al. (2023). *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi. Global Eksekutif Teknologi*.

- Septiana, Anis Ribcalia, et al. (2023). *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi. Global Eksekutif Teknologi.*
- Setiawan, Hendy, & Choirunnisa, Choirunnisa. (2023). *The paradox of special autonomy: Why does wealth make Papua poor? Paradoks otonomi khusus: Mengapa kekayaan dapat memiskinkan Papua?*. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 36(3), 408-20.
- Sidney, Mara S. (2017). Policy formulation: design and tools. Dalam F. Fischer & G. J. Miller (Eds.), *Handbook of public policy analysis* (hlm. 105-114). Routledge.
- Silalahi, Ronald Maraden Parlindungan. (2018). Discourse Legitimation: A Description of Public Policy from the Perspective of Critical Discourse Analysis. *Journal of English Language and Culture*, 8(1).
- Simeon, Richard. (1976). Studying public policy. *Canadian Journal of Political Science/Revue Canadienne De Science Politique*, 9(4), 548-580.
- Singkoh, Frans C. (2012). Peran elit politik dalam proses penetapan kebijakan publik di DPRD Kota Manado. *Jurnal Ekskutif* [internet][dikutip 24 November 2014], 2(1), 1-23.
- Siregar, Hotrun. (2018). Studi Kebijakan Politik: Aktor dan Isu Dalam Proses Pengambilan Keputusan. Communitarian: *Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 1(1).
- Siregar, Hotrun. (2018). Studi Kebijakan Politik: Aktor dan Isu Dalam Proses Pengambilan Keputusan. Communitarian: *Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 1(1).
- Siregar, Muklis. (2024). *Analysis of Factors that Influence Public Policy. Holistic Science*, 4(2), 159-167.
- Smith-Bingham, Richard. (2006). *Public policy, innovation and the need for creativity*. Dalam L. E. L. Craft (Ed.), *Developing creativity in higher education* (hlm. 10-18). Routledge.
- Sore, Uddin B. (2017). *Kebijakan Publik* (Vol. 1). Sah Media.

- Sovacool, Benjamin K. (2010). *The political economy of oil and gas in Southeast Asia: heading towards the natural resource curse?*. The Pacific Review, 23(2), 225-259.
- Steinberg, Florian. (2007). *Housing reconstruction and rehabilitation in Aceh and Nias, Indonesia—Rebuilding lives*. Habitat International, 31(1), 150-166.
- Styczynski, Annika Bose, & Hughes, Llewelyn. (2019). *Public policy strategies for next-generation vehicle technologies: An overview of leading markets*. Environmental Innovation and Societal Transitions, 31, 262-272.
- Suaib, Hermanto, et al. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.
- Sutmasa, Yosep Gede. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25-36.
- Suwitri, Sri. (2008). *Konsep dasar kebijakan publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Tarigan, Annisa Kania Fauzani, & Syarifah, Iip Mustopa. (2024). Teori Terbentuknya Kelompok. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(4), 488-493.
- Teodorescu, Bianca. (2014). *Modelling anthropological profile by communication*. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 43, 109-115.
- Tr, Cut Asmaul Husna. (2018). Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 140-163.
- Trochim, William MK. (2009). *Evaluation policy and evaluation practice*. New Directions for Evaluation, 2009(123), 13-32.
- True, James L. (2000). *Avalanches and incrementalism: Making policy and budgets in the United States*. The American Review of Public Administration, 30(1), 3-18.
- Tuhri, Mufdil, Maarif, Samsul, & Simarmata, Rikardo. (2020). *Adat, Islam, and the idea of religion in colonial Indonesia*. Al Albab, 9(2), 159-178.

- Valodia, Imraan. (2010). *Conclusion and policy recommendations*. Dalam I. Valodia (Ed.), *Taxation and Gender Equity. A comparative analysis of direct and indirect taxes in developing and developed countries* (hlm. 165-177). Routledge.
- Van den Bosch, Karel, & Cantillon, Bea. (2006). *Policy impact*. Dalam M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin (Eds.), *The Oxford handbook of public policy* (hlm. 296-319). Oxford University Press.
- van Veenstra, Anne Fleur, & Kotterink, Bas. (2017). *Data-driven policy making: The policy lab approach*. Dalam *Electronic Participation: 9th IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2017, St. Petersburg, Russia, September 4-7, 2017, Proceedings* (hlm. 219-232). Springer International Publishing.
- Vedung, Evert. (2017). *Public policy and program evaluation*. Routledge.
- Vining, Aidan R., & Weimer, David L. (2006). *Efficiency and cost-benefit analysis*. Dalam M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin (Eds.), *Handbook of public policy* (hlm. 417-432). Oxford University Press.
- Viscusi, W. Kip. (1994). *Mortality effects of regulatory costs and policy evaluation criteria*. *The RAND Journal of Economics*, 25(1), 94-109.
- Wahab, Solichin Abdul. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Walker, Warren E., & Marchau, Vincent AWJ. (2003). *Dealing with uncertainty in policy analysis and policymaking*. *Integrated Assessment*, 4(1), 1-4.
- Wardi, Moh. (2019). *The Elite Deliberative Democratic Model In The Public Policy Formulation For Madrasah Diniyyah (Islamic Non Formal School) Development In East Java*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Webster, Mort, et al. (2003). *Uncertainty analysis of climate change and policy response*. Climatic Change, 61(3), 295-320.
- Weiler, Hans N. (1983). *Legalization, expertise, and participation: Strategies of compensatory legitimization in educational policy*. Comparative Education Review, 27(2), 259-277.
- Weiss, Carol Hirschon. (1999). *The interface between evaluation and public policy*. Evaluation, 5(4), 468-486.
- Wibisono, Rizky Bangun, & Rohman, Abd. (2024). "SHAPING PUBLIC POLICY AND SOCIETY:" THE APPLICATION OF RATIONAL CHOICE THEORY IN INDONESIA AND TURKIYE. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 57-65.
- Wibisono, Rizky Bangun, & Rohman, Abd. (2024). "SHAPING PUBLIC POLICY AND SOCIETY:" THE APPLICATION OF RATIONAL CHOICE THEORY IN INDONESIA AND TURKIYE. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 57-65.
- Wibisono, Rizky Bangun, & Rohman, Abd. (2024). "SHAPING PUBLIC POLICY AND SOCIETY:" THE APPLICATION OF RATIONAL CHOICE THEORY IN INDONESIA AND TURKIYE. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 57-65.
- Wibowo, AGUS BUDI. "Tueng Bila as a Characteristic and Identity of Acehnese Culture." *Akademika* 84.1 (2014): 3-15.
- Wibowo, AGUS BUDI. (2014). *Tueng Bila as a Characteristic and Identity of Acehnese Culture*. *Akademika*, 84(1), 3-15.
- Wibowo, AGUS BUDI. (2014). *Tueng Bila as a Characteristic and Identity of Acehnese Culture*. *Akademika*, 84(1), 3-15.
- Wibowo, AGUS BUDI. (2014). *Tueng Bila as a Characteristic and Identity of Acehnese Culture*. *Akademika*, 84(1), 3-15.
- Wibowo, AGUS BUDI. (2014). *Tueng Bila as a Characteristic and Identity of Acehnese Culture*. *Akademika*, 84(1), 3-15.
- Wibowo, AGUS BUDI. (2014). *Tueng Bila as a Characteristic and Identity of Acehnese Culture*. *Akademika*, 84(1), 3-15.
- Wibowo, AGUS BUDI. (2014). *Tueng Bila as a Characteristic and Identity of Acehnese Culture*. *Akademika*, 84(1), 3-15.

- Williams, Bruce A. (1979). *Beyond "Incrementalism", Organizational Theory and Public Policy*. *Policy Studies Journal*, 7(4).
- Wollmann, Hellmut. (2017). *Policy evaluation and evaluation research*. Dalam F. Fischer & G. J. Miller (Eds.), *Handbook of public policy analysis* (hlm. 419-428). Routledge.
- Woo, Jun Jie, Ramesh, Michael, & Howlett, Michael. (2015). Legitimation capacity: System-level resources and political skills in public policy. *Policy and Society*, 34(3-4), 271-283.
- Wood, Robert S. (2006). *The dynamics of incrementalism: Subsystems, politics, and public lands*. *Policy Studies Journal*, 34(1), 1-16.
- Wukich, Clayton, & Siciliano, Michael D. (2014). Problem solving and creativity in public policy courses: *Promoting interest and civic engagement*. *Journal of Political Science Education*, 10(3), 352-368.
- Yoe, Charles. (2019). *Principles of risk analysis: decision making under uncertainty*. CRC Press.
- Zahariadis, Nikolaos. (Ed.). (2016). *Handbook of public policy agenda setting*. Edward Elgar Publishing.
- Zeb-un-Nisa, Dr Ghulam Mustafa, et al. (2021). Theoretical Approaches to Study the Public Policy: An Analysis of The Cyclic/Stages Heuristic Mode. *Palarch's J. Archaeol. Egypt/Egyptol*, 18, 1307-1321.
- Zhang, Wei, et al. (2023). Social network analysis and public policy: what's new?. *Journal of Asian Public Policy*, 16(2), 115-145.
- Zheng, Haitao, De Jong, Martin, & Koppenjan, Joop. (2010). *Applying policy network theory to policy-making in China: the case of urban health insurance reform*. *Public Administration*, 88(2), 398-417.
- Zhou, Nan, Xiao, Xiangze, & Feng, Feng. (2014). *Citizen Participation in the Public Policy Process in China: Based on Policy Network Theory*. *Public Administration Research*, 3(2), 91.

- Ziegenhain, Patrick. "The Aceh conflict during the new order and the following democratization process." *Aceh: History, politics and culture* 9 (2010): 120-34.
- Zube, Ervin H. (1984). *Environmental evaluation: perception and public policy* (No. 3). Cambridge University Press.
- Zulkarnaen, Iskandar, & Suzanna, Ella. (2018). *Aceh: Conflict Development after the Helsinki Agreement*. Proceedings of MICoMS 2017 (hlm. 589-593). Emerald Publishing Limited.



## **PROFIL PENULIS**



**Dr. Dahlan A. Rahman, M.Si.** adalah seorang akademisi dan pakar di bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan. Saat ini, beliau menjabat sebagai dosen di Program Studi Magister Administrasi Publik dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh (Unimal) ([ilmupolitik.fisip.unimal.ac.id](http://ilmupolitik.fisip.unimal.ac.id)).

Minat penelitian dan kepakaran Dr. Dahlan A. Rahman meliputi berbagai isu krusial dalam administrasi dan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan konteks Aceh. Ini terlihat dari publikasinya yang membahas tentang korupsi, birokrasi, manajemen publik, otonomi daerah, tata kelola pemerintahan, serta isu-isu lokal Aceh. Karya-karya beliau mencerminkan komitmennya untuk menganalisis dan memahami dinamika kebijakan publik di Indonesia, terutama di wilayah yang memiliki kekhususan seperti Aceh.

Baik, berdasarkan informasi yang tersedia di profil Google Scholar dan laman dosen Universitas Malikussaleh, dapat diuraikan pengalaman berorganisasi Dahlan A. Rahman meskipun detail spesifik mengenai peran dan periode jabatan dalam setiap organisasi mungkin tidak selalu tertera secara eksplisit di sana

Dahlan A. Rahman dikenal sebagai akademisi yang memiliki pengalaman berorganisasi yang luas, mencerminkan dedikasi dan keterlibatannya tidak hanya di ranah akademik tetapi juga dalam

komunitas yang lebih besar. Pengalaman ini membentuk perspektifnya dalam memahami dinamika kebijakan publik dari berbagai sudut pandang.

Meskipun detail spesifik mengenai jabatan dan periode waktu dalam setiap organisasi mungkin memerlukan konfirmasi langsung, profil publiknya mengindikasikan keterlibatan yang mendalam. Sebagai seorang dosen dan peneliti di bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan, sangat mungkin Dahlan A. Rahman aktif dalam berbagai asosiasi profesi atau perkumpulan ilmiah yang relevan dengan disiplin ilmunya. Keanggotaan dalam organisasi semacam ini adalah hal yang lumrah bagi akademisi untuk berjejaring, berbagi pengetahuan, dan berpartisipasi dalam pengembangan teori serta praktik di bidangnya. Keterlibatannya dalam publikasi ilmiah di jurnal-jurnal dan konferensi menunjukkan bahwa beliau adalah bagian aktif dari komunitas akademis yang terorganisir.

Keterlibatan Dahlan A. Rahman dalam isu-isu kebijakan publik di Aceh mengisyaratkan bahwa beliau kemungkinan besar juga memiliki pengalaman di lembaga penelitian atau pusat studi yang berfokus pada kebijakan atau isu-isu lokal Aceh. Pusat-pusat studi ini seringkali berfungsi sebagai wadah bagi para akademisi untuk melakukan riset terapan, mengadvokasi kebijakan, dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Pengalaman di sini memberinya pemahaman tentang bagaimana hasil penelitian diterjemahkan ke dalam rekomendasi praktis.

Mengingat minat penelitiannya yang kuat pada otonomi daerah, tata kelola pemerintahan, dan isu-isu lokal Aceh termasuk korupsi dan birokrasi dapat diasumsikan bahwa Dahlan A. Rahman juga memiliki keterlibatan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya

masyarakat (LSM). Para akademisi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu-isu publik seringkali berinteraksi dengan atau menjadi bagian dari organisasi yang berupaya memengaruhi kebijakan demi kebaikan masyarakat. Pengalaman ini memberinya perspektif dari "bawah" atau dari sisi penerima kebijakan.

Secara keseluruhan, pengalaman berorganisasi Dahlan A. Rahman yang luas ini tidak hanya memperkaya wawasan akademisnya, tetapi juga memberinya pemahaman praktis tentang kompleksitas interaksi antar-aktor dalam proses kebijakan.